

PERTAHANAN ASIA PASIFIK DALAM PUSARAN GLOBALISASI

Oleh: Muhamad Haripin

Resensi Buku

Judul buku : *Globalization and Defence in the Asia-Pacific: Arms across Asia*
Penulis : Geoffrey Till, Emrys Chew, dan Joshua Ho
Penerbit : Routledge, New York, 2009
Tebal : xiv + 270 hlm.

Abstract

Globalization has dramatically changed state's threat perception and defence posture. Furthermore, new players and new forms of interconnectedness between state actors and non-state actors shape the contemporary landscape of international security. Throughout Asia-Pacific, nation-states have started to realize that it is less relevant to focus only on traditional military invasion. Other challenges, e.g. transnational crime and terrorism, are awaiting for government's swift –yet effective– response.

Pendahuluan

Globalisasi membawa banyak perubahan bagi kehidupan sosial-budaya, ekonomi, dan politik masyarakat kontemporer. Pengertian dasar “globalisasi” yang banyak dipahami dan disepakati adalah proses integrasi ekonomi domestik negara-bangsa di (hampir) seluruh dunia menuju terbentuknya integrasi pasar global. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya proses tersebut di antaranya adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, percepatan akselerasi modal serta investasi, dan efisiensi ongkos perjalanan lintas-negara.

Saat ini, sedikitnya, ada tiga pandangan arus utama yang memaknai globalisasi sebagai suatu proses dinamika gerak sejarah, wacana kelompok elit ekonomi-politik, ataupun kondisi yang tak terelakkan.

Pandangan pertama menyatakan bahwa globalisasi merupakan berkah bagi umat manusia. Globalisasi berhasil meningkatkan kesejahteraan banyak masyarakat di negara berkembang melalui transaksi perdagangan global. Namun, optimisme ini ditolak oleh pandangan kedua yang berpendapat bahwa globalisasi justru memiskinkan serta memarginalkan masyarakat di banyak negara. Kini, urusan kemiskinan tidak

hanya berdimensi vertikal di antara negara Utara (AS dan Eropa) dengan negara Selatan (Asia dan Afrika) namun juga horizontal, yaitu melebarnya kesenjangan sosio-ekonomi di dalam masyarakat negara maju atau berkembang itu sendiri. Pandangan ketiga merupakan jalan tengah atau moderat dari dua pandangan sebelumnya. Globalisasi merupakan pedang bermata dua: globalisasi bisa berdampak positif maupun negatif. Pandangan terakhir ini dianut oleh banyak pihak, termasuk para akademisi yang menulis artikel di buku berjudul *Globalization and Defence in the Asia-Pacific: Arms across Asia*.

Topik buku *Globalization and Defence in the Asia-Pacific* adalah pengaruh globalisasi terhadap pertahanan di Asia Pasifik. Pembahasan terdiri atas tiga bagian. *Pertama*, kajian teoritis mengenai relasi di antara globalisasi dan pertahanan, terutama dalam perspektif studi Hubungan Internasional. *Kedua*, uraian studi kasus pengaruh globalisasi terhadap persepsi ancaman (*threat perception*) serta *ketiga*, postur pertahanan di kawasan Asia Tenggara, Timur serta Selatan.

Globalisasi dan Pertahanan

Berangkat dari kesepakatan bahwa globalisasi adalah pedang bermata dua, dampak jelas glo-

balisasi terhadap pertahanan negara belum dapat dirumuskan dalam satu kesimpulan yang lengkap serta rigid. Brian M. Pollins di artikel berjudul “*Globalization and armed conflict among nations: prospects through the lens of International Relations Theory*” menulis bahwa sejauh ini teori-teori kontemporer dalam Hubungan Internasional baru berhasil menjelaskan relasi globalisasi serta pertahanan, namun jawaban atas pertanyaan apakah relasi tersebut bersifat konstruktif atau destruktif belumlah jelas. Konstruktif, dalam konteks globalisasi serta pertahanan adalah globalisasi berpengaruh positif terhadap keamanan serta pembangunan masyarakat global, atau dengan kata lain, globalisasi—seperti dipercayai kelompok liberal—membawa perdamaian bagi umat manusia. Sebaliknya, sifat destruktif bermakna globalisasi telah melahirkan konflik-konflik baru serta ancaman peperangan besar di masa depan (*major wars*).

Dari aspek teoritis, tantangan yang kini mesti dihadapi oleh negara-bangsa dalam menyikapi globalisasi adalah terkait dengan kemunculan ‘pemain baru’ (*new players*) dan ‘bentuk baru interkoneksi’ (*new forms of interconnectedness*) di sektor ekonomi-politik internasional. Keterbukaan ekonomi dan kemudahan teknologi telah memberi peluang kesempatan besar bagi perluasan partisipasi dan aktivitas aktor non-negara. Korporasi multinasional, organisasi inter-pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (NGO) adalah beberapa contoh aktor non-negara yang kini memiliki daya jelajah global. Seiring dengan kemajuannya tersebut, jika dibandingkan dengan waktu dahulu, korporasi dan organisasi sipil tersebut memberi warna baru dalam per-caturan politik internasional, misalnya perluasan serta percepatan diseminasi ide-ide demokrasi atau pasar bebas dengan cara-cara yang inovatif dan berbasis masyarakat.

Selanjutnya, tantangan bentuk interkoneksi baru adalah terciptanya relasi-relasi antar-negara-bangsa di dunia yang tidak hanya dilandasi kepentingan militer dan ekonomi yang dijalankan pada level aktor negara, melainkan juga oleh keterhubungan sosial-kultural yang dijalankan aktor non-negara ataupun masyarakat biasa. Kondisi interkoneksi tersebut membuat sebagian

besar masyarakat dunia menjadi terintegrasi. Christopher W. Hughes dalam artikelnya yang berjudul “*Beyond interdependence: globalization, state transformation and security*” menulis bahwa integrasi tersebut melingkupi proses internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi menurut standar negara maju serta westernisasi.

Berkaca kepada konteks kedaulatan negara, Christopher W. Hughes dalam artikelnya berjudul “*Beyond interdependence: globalization, state transformation and security*” berpendapat bahwa globalisasi pada dasarnya merupakan ‘deteritorialisasi ruang sosial’ atau dalam frase lain bisa disebut ‘suprateritorialisasi interaksi sosial’.¹ Pada satu sisi, globalisasi telah melikuidasi interaksi sosial berbasis kewilayahan tradisional, namun pada sisi lain, globalisasi merepresentasikan kelahiran ruang baru yang berkarakter lintas batas serta melampaui teritori fisik. Pendorong terjadinya proses tersebut adalah kemajuan teknologi-informasi dan kemudahan sirkulasi kapital lintas-regional. Globalisasi, dengan karakter deteritorialnya, turut memengaruhi kedaulatan negara (*state sovereignty*). Interdependensi ekonomi berpotensi meningkatkan rivalitas antar-negara dalam melindungi kedaulatan serta kepentingan nasional, misalnya proteksi terhadap pasar domestik serta akses energi. Rivalitas tersebut, menurut Hughes, berpotensi memicu konflik bersenjata inter- ataupun intra-negara, terutama di negara-negara lemah (*weak states*). Dengan kata lain, globalisasi pada derajat tertentu dapat menjadi pemicu instabilitas regional ataupun internasional.

Persepsi Ancaman

Globalisasi memiliki dampak yang berbeda-beda di setiap kawasan atau negara, tergantung kepada konteks historis dan ekonomi-politik yang berlaku secara unik-spesifik. Namun, bukan berarti tidak ada kesamaan sama sekali dan justru kesamaan inilah yang menarik untuk didiskusikan karena bisa diambil pelajaran penting dari pengalaman masing-masing kawasan ataupun negara. Secara umum buku *Globalization and Defence in the Asia-Pacific* dapat dirangkum sebagai berikut bahwa dampak globalisasi yang sama-sama dialami oleh negara di kawasan Asia Pasifik

¹ Lihat buku ini, hlm. 37.

adalah (i) perluasan spektrum ancaman, dan (ii) tekanan atas perubahan orientasi keamanan nasional.

Rizal Sukma dalam artikel “Globalization’s impact on threat perceptions and defence postures in Southeast Asia: two views” menulis bahwa bagi Asia Tenggara, globalisasi membawa konsekuensi atas timbulnya ancaman-ancaman keamanan yang memang tidak sejatinya baru, namun kini mengalami peningkatan intensitas serta kompleksitas. Saat ini isu keamanan tradisional maupun non-tradisional menuntut perhatian yang porsinya sama banyak. Pembajakan (*piracy*), penyelundupan narkotika dan senjata, teroris, kekerasan komunal dan etnis serta kejahatan transnasional—sulit untuk dipungkiri—terjadi karena adanya kemudahan teknologi dan transfer dana: dua kemajuan yang melekat pada globalisasi. Lebih jauh lagi, Sukma menyebutkan kelaparan, kemiskinan, penyebaran penyakit, dan pelanggaran HAM sebagai masalah yang mengiringi proses globalisasi.

Dalam artikel yang sama, Nathan menulis bahwa kompleksitas permasalahan yang dibawa oleh proses globalisasi terhadap kehidupan masyarakat telah menempatkan negara sebagai aktor yang –sekali lagi- penting. Dalam banyak hal, berbeda dengan klaim para ekonom neoliberal yang berpendapat globalisasi telah meminggirkan peran negara, globalisasi pada kenyataannya justru memperbesar peran serta kekuasaan negara, terutama dalam sektor keamanan. Namun demikian, Sukma memberi catatan penting bahwa penguatan negara tersebut bukan tanpa risiko, terlebih dalam konteks Asia Tenggara. Selama era kemajuan ekonomi pertengahan abad ke-20, negara-negara di kawasan Asia Tenggara dipimpin oleh para despot dengan orientasi keamanan nasional yang *inward-looking*. Keamanan nasional didefinisikan secara sempit sebagai stabilitas domestik, kewaspadaan –atau paranoid- atas intervensi eksternal serta legitimasi rezim berdasarkan kekerasan.

Saat ini, globalisasi mendorong negara untuk mengubah orientasi atau cara pandang mengenai keamanan nasional dalam konteks kawasan. Negara dituntut untuk berpikir berorientasi *outward-looking* (‘ke luar’), memerhatikan opini publik internasional atas isu HAM, dan

komprehensif dalam arti memahami interkoneksi penyelesaian masalah regional, contohnya pengamanan di Selat Malaka serta penyelesaian sengketa perbatasan di Laut Cina Selatan yang sulit diselesaikan dengan pendekatan unilateral serta *inward-looking*.

B. Raman menulis artikel yang menarik tentang relasi globalisasi dan persepsi ancaman di Asia Selatan. Dalam artikel berjudul “Globalization’s impact on threat perceptions and defence postures in South Asia,” Raman berpendapat bahwa globalisasi pada dasarnya mendorong negara untuk lebih terhubung dengan negara lain daripada era sebelumnya. Namun, keterhubungan atau interdependensi tersebut dapat berlangsung secara konstruktif bagi para pihak jika ada “persamaan rasa psikologis” (*psychological sense of parity*). Jika tidak ada persamaan, relasi yang terjadi adalah perubahan interkoneksi menuju dependensi (satu arah). Relasi India-Cina merupakan contoh di mana interdependensi konstruktif bisa berlangsung karena kedua negara memiliki ‘persamaan rasa psikologis’ dalam kekuatan ekonomi maupun keamanan-strategis. Dengan kata lain, status India-Cina sebagai *the rising powers* di Asia Pasifik membuat keduanya bisa lebih terlibat dalam kooperasi. Sepintas, argumen Raman ini janggal karena berbeda dengan pandangan arus utama, terutama dalam kerangka teoritis Realis, yang berbicara tentang *the endless competition* (kompetisi tak berkesudahan) dalam keanarkian politik internasional. Bagaimanapun, artikel Raman ini membuka cakrawala baru mengenai berbagai kemungkinan konstelasi politik kawasan berdasarkan skenario optimis.

Ekonomi pertahanan

Selain persepsi ancaman dan orientasi keamanan nasional, globalisasi pun memunculkan kebutuhan atas penyesuaian postur pertahanan di Asia Pasifik. Urusan tersebut berkaitan dengan upaya riil tiap negara untuk melindungi teritori dan masyarakatnya dari beragam ancaman kontemporer. Kebijakan konkret yang bisa dilakukan negara di antaranya adalah menaikkan anggaran militer (*military expenditure*), pengembangan industri pertahanan nasional serta modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Ron Matthews dalam artikelnya di buku ini berjudul "Defence and the economy: an introduction" melihat bahwa telah sejak lama, negara memperlakukan sektor keamanan, terutama pertahanan militer, sebagai domain strategis yang eksklusif serta tertutup. Informasi tentang anggaran pertahanan dan modernisasi Alutsista sebisa mungkin ditutup rapat dari pihak lain. Industri pertahanan pun dikembangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan militer nasional (*self-reliance*). Di AS, contohnya, pernah dibuat regulasi 'Buy America' yang melindungi industri pertahanan nasional. Uni Eropa, Rusia termasuk dulu Uni Soviet, dan negara berkembang seperti Cina, India, Pakistan, Malaysia, dan Singapura pun memiliki kebijakan serupa.²

Seiring dengan berlangsungnya proses globalisasi, sebagaimana ditulis Ron Matthews dalam "Defence and the economy: an introduction," kecenderungan produksi mandiri dan proteksionisme dalam ekonomi pertahanan kini mendapat tantangan sekaligus peluang hebat yang pada era sebelumnya belum pernah ada. Kondisi kontemporer memperlihatkan bahwa negara-negara yang mendapat berkah dari globalisasi, terutama pertumbuhan ekonomi, mulai beramai-ramai memanfaatkan semaksimal mungkin berbagai kemudahan serta keunggulan teknologi militer serta sipil (*commercial-off-the-shelf*) yang tersedia di pasar global untuk digunakan bagi industri pertahanan nasional, terlebih lagi kini muncul kebutuhan atas teknologi komunikasi yang bisa mendukung program *revolution in military affairs*. Globalisasi telah membuka kesempatan besar bagi pembentukan kerjasama di antara pemerintah, institusi militer, dan kelompok industri (*the iron triangle*) di dalam maupun luar negeri, namun juga muncul tantangan atas perlindungan aset ataupun data rahasia negara.

Arthur S. Ding dalam artikel berjudul "Globalization and defence industry in East Asia: seeking self-sufficiency and teaming up for dual-use technology" memperlihatkan kasus menarik tentang Cina yang berusaha memenuhi kebutuhan militernya di tengah dinamika komersialisasi industri pertahanan global. Cina adalah salah satu negara yang saat

ini mengalami *boom* ekonomi. Keanggotaan di WTO dan ASEAN+3 membuat pertumbuhan ekonomi Cina semakin ekspansif. Seperti lazim dialami oleh negara *rising power*, termasuk AS serta negara kawasan Eropa pada pertengahan abad ke-20, pemerintah Cina memiliki kebutuhan untuk turut meningkatkan kapabilitas militernya. Secara bertahap sejak awal dekade '90, Cina menaikkan anggaran militer, mengembangkan industri pertahanan serta memodernkan Alutsista. Tak pelak tindakan tersebut menimbulkan dilema keamanan (*security dilemma*) bagi negara lain, terutama Jepang serta AS.

Untuk memenuhi kebutuhan militernya, Cina melakukan kerjasama (*joint venture*) dengan Uni Eropa (meski ada penolakan dari masyarakat sipil di Eropa Barat) dan memproduksi komoditas dengan teknologi yang bisa memenuhi kualifikasi militer sekaligus sipil-komersial (*dual-use technology*). Pilihan *joint venture* dan produksi *dual-use technology* adalah untuk memaksimalkan sumber daya yang terbatas di tengah kebutuhan teknologi militer yang mendesak serta memberikan ruang kebebasan bagi industri guna menghasilkan produk inovatif.

Hampir serupa dengan Cina, negara-negara di Asia Tenggara juga berusaha berselancar dengan mulus dalam gelombang globalisasi. Pascakrisis 1997, empat negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand membuka ekonomi domestik bagi investor asing sambil meningkatkan kapabilitas militer secara bertahap. Renato Cruz De Castro dalam artikel "Exploring Southeast Asia's twenty-first century defence economis: opportunities and challenges in the era of globalization, 1993-2005" berpendapat bahwasanya empat negara tersebut juga tidak mengalami dilema *guns versus butter* yang biasanya dialami negara berkembang dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca-krisis. Keuntungan ekonomi dari transaksi perdagangan global digunakan sebagai modal untuk peningkatan kapabilitas militer, selain untuk pembiayaan program pembangunan.

Kondisi yang serupa terjadi di Asia Selatan. India, tulis Vijay Sakhuja dalam artikel "Globalization and the defence economy of South Asia: two views," adalah contoh terbaik negara yang mengalami kemajuan dalam bidang pertahanan

² Lihat buku ini, hlm. 138.

berkat globalisasi. Teknologi, GDP nasional, dan belanja pertahanan India mengalami pertumbuhan bersamaan dengan menggeliatnya industri pertahanan nasional, transformasi pertahanan serta ekspor alutsista. Namun, dalam konteks kawasan, kemajuan India ini memicu kekhawatiran di pihak Pakistan yang selama ini masih bersengketa dengan India terkait persoalan Kashmir.

Catatan kritis tentang kemajuan Asia Tenggara ditulis oleh Rommel C. Banlaoi dalam artikel “*Globalization’s impact on defence industry in Southeast Asia.*” Banlaoi berpendapat bahwa pengembangan militer di Asia Tenggara, terkecuali Singapura, menyimpan persoalan bagi industri pertahanan domestik. Kecenderungan yang terjadi adalah Asia Tenggara hanya berperan sebagai konsumen senjata, bukan produsen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara (atau Asia Pasifik pada umumnya) mengalami ketergantungan dan, menurut Geoffrey Till, cenderung memilih bekerjasama dengan AS dan negara-negara Eropa daripada melakukan kooperasi intra-kawasan, meski mereka menghadapi problem keamanan yang serupa.³

Globalisasi menjadi pendorong negara di Asia Pasifik untuk menempatkan keunggulan teknologi sebagai pertimbangan utama dalam usaha pengembangan industri pertahanan dibandingkan pertimbangan kedekatan geografis karena dunia saat ini, tidak lain, adalah dunia yang menyusut (*a shrinking world*).

Secara umum, tiga belas artikel dalam buku *Globalization and Defence in the Asia-Pacific* menyuguhkan pandangan yang menarik tentang relasi globalisasi dan pertahanan di Asia Pasifik. Uraian teoretis di bagian pertama menyajikan kerangka teoritis yang memadai untuk mengantarkan pembaca kepada uraian studi kasus di bagian selanjutnya. Sudut pandang penulis dan data yang ditampilkan pun relatif baru serta relevan dengan kebutuhan kalangan akademisi maupun praktisi yang bergelut dengan isu keamanan kontemporer di Asia Pasifik.

Pelajaran bagi Indonesia

Khusus untuk konteks Indonesia, buku ini bisa menjadi referensi penting dalam melihat

sekaligus memahami perkembangan termutakhir mengenai pertahanan Asia Pasifik. Dari pemahaman tersebut, para pemangku kepentingan sektor pertahanan --yang terentang mulai dari kementerian pertahanan, tentara nasional Indonesia, parlemen, hingga masyarakat sipil-- dapat memperkaya materi diskusi perumusan kebijakan pertahanan yang tepat bagi Indonesia, terutama berdasarkan tiga bagian pembahasan dalam buku *Globalization and Defence in the Asia-Pacific*.

Pertama, tentang globalisasi. Sejauh ini, wacana globalisasi di Indonesia didominasi oleh perdebatan pada tataran makro mengenai ekonomi-politik, misalnya tentang perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan negara lain. Kondisi faktual memperlihatkan bahwa globalisasi ternyata berdampak pula terhadap pertahanan negara. Melalui buku ini, Indonesia dapat belajar bahwa kehadiran *new players* dan *new forms of interconnectedness* --sebagai pendorong sekaligus konsekuensi globalisasi-- membutuhkan skema kebijakan pertahanan dan politik luar negeri yang lebih responsif dan fleksibel, namun tetap berpijak pada keutamaan kepentingan nasional. Dengan kata lain, Indonesia mesti cerdik dalam menyikapi fenomena globalisasi dengan strategi “berlayar di antara banyak karang”, sebuah pengembangan faktual atas konsepsi M. Hatta tentang politik luar negeri Indonesia.

Kedua, tentang persepsi ancaman. Indonesia pada dasarnya telah menyadari bahwa pada saat ini ancaman tidak lagi bersifat tradisional dalam bentuk invasi militer, melainkan menjalar kepada ancaman non-tradisional seperti terorisme dan kejahatan lintasnegara. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Kementerian Pertahanan telah menjelaskan pokok-pokok pemikiran mengenai proyeksi ancaman dan gambaran umum strategi penanggulangannya.⁴ Perkembangan ini terjadi bersamaan dengan perubahan orientasi secara inkremental di dalam tubuh kementerian maupun angkatan bersenjata mengenai keamanan nasional, dari yang *inward-looking* menuju *outward-looking*. Negara tidak bisa mengelak dari perkembangan tersebut karena: (i). tuntutan atas penghormatan hak asasi manusia sehingga

³ Lihat buku ini, hlm. 257.

⁴ Lihat Departemen Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. (Jakarta: Dephan RI. 2008).

pemerintah ditekan untuk tidak lagi melihat masyarakat ataupun oposisi sebagai musuh negara; dan (ii). kebutuhan Indonesia untuk memperbaiki citra di mata masyarakat internasional, sekaligus menutupi kekurangan kapabilitas penegak hukum dan militer nasional dalam menghadapi ancaman, melalui pembentukan kerjasama keamanan dengan beberapa negara sahabat.

Ketiga, tentang ekonomi pertahanan. Topik ini barangkali yang paling penting dan memerlukan perhatian khusus Indonesia. Hipotesis yang dibangun dalam buku *Globalization and Defence in the Asia-Pacific* adalah globalisasi merupakan peluang bagi pembangunan industri pertahanan nasional, dan hipotesis tersebut kemudian diuji dengan studi kasus pelaksanaan program pembangunan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) negara-negara di Asia Pasifik, misalnya Cina dan India. Hasilnya ternyata mendukung hipotesis, meski tentu saja tidak minus dari catatan kritis, sebagaimana ditulis oleh Banlaoi.

Berbekal pemasukan dari pertumbuhan ekonomi akibat pembukaan pasar nasional terhadap pasar global, Cina dan India meningkatkan anggaran militer, membangun industri pertahanan nasional, dan bahkan mulai mengeksport alutsista strategis kepada negara-negara lain. Strategi *joint venture* dan *dual-use technology* ternyata ampuh menutupi kesenjangan antara kebutuhan pertahanan atas meluasnya spektrum ancaman serta mahalnnya biaya pembangunan alutsista dengan kapabilitas riil nasional (terutama dari segi penguasaan teknologi) dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Namun dalam konteks Indonesia, contoh Cina dan India tersebut tidak bisa diterapkan mentah-mentah. Pada level lain, pada dasarnya para penulis artikel dalam buku ini terkesan terlalu optimis dengan globalisasi dan melupakan variabel lain sehingga pembangunan pertahanan di Cina dan India hanya dilihat dari aspek materiil dan peningkatan kuantitas. Variabel lain yang bisa dimasukkan, dan dalam perkembangannya bisa menghasilkan kesimpulan berbeda, adalah proses demokratisasi.⁵

⁵ James Wirtz, "Changing International Threat Perceptions," dlm. Thomas Bruneau dan Harold Trikunas, *Global Politics of Defense Reform*, (New York: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 76-80

Di Indonesia, transisi demokrasi merupakan proses politik yang gaduh dan belum terkonsolidasi secara matang. Seperti ditulis oleh Michael Malley, proses politik yang melibatkan banyak aktor, kepentingan, dan lemahnya kepemimpinan sipil karena tergantung kepada legitimasi militer ternyata menghambat perkembangan reformasi militer.⁶ Meski secara materil dan kuantitas, Indonesia telah memiliki rencana dan kebijakan ekonomi pertahanan berjangka panjang dan sistematis (peningkatan postur pertahanan melalui profesionalisme TNI dan modernisasi alutsista), namun dalam perkembangannya kualitas reformasi tersebut dilingkupi oleh sebuah tanda tanya besar: adakah jaminan bahwa rencana dan kebijakan tersebut akan berjalan dengan konsisten, transparan, akuntabel, efisien serta efektif. Selain itu, permasalahan yang menghadang pembangunan Indonesia yang tidak hanya berlaku pada sektor pertahanan, adalah korupsi dan ekonomi rente. Kegaduhan transisi demokrasi, korupsi, dan rente, bagaimanapun juga, berpotensi besar membajak proses pembangunan pertahanan Indonesia meski pintu globalisasi terbuka lebar serta Indonesia memiliki *joint venture* dan kapabilitas *dual-use technology* yang mumpuni.

Poin masalah tersebut yang sepertinya luput untuk digali secara mendalam oleh buku *Globalization and Defence in the Asia-Pacific*, padahal konteks proses demokratisasi, korupsi, dan ekonomi rente merupakan variabel penting –atau bahkan tak terpisahkan– dari kondisi domestik negara-negara di kawasan Asia Pasifik, seperti misalnya Thailand dan Filipina, dalam membangun postur pertahanan negara dan kerjasama keamanan dengan negara lain.

Daftar Pustaka

- Bruneau, Thomas dan Harold Trikunas. 2008. *Global Politics of Defense Reform*. New York: Palgrave Macmillan.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Dephan R.I.

⁶ Michael Malley, "Democratization and the Challenge of Defense Reform in Indonesia," dlm. Thomas Bruneau dan Harold Trikunas, *Global Politics of Defense Reform*, (New York: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 266-267.